

**SKRIPSI**

**ANALISIS PENERAPAN AKUNTANSI PADA DESA BANGLAS BARAT  
KECAMATAN TEBING TINGGI KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI**

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh*

*Gelar Sarjana Pada Fakultas Ekonomi*

*Universitas Islam Riau*

*Pekanbaru*



**Oleh**

**NURUL HASANAH**

**NPM : 155310125**

**JURUSAN AKUNTANSI S-1  
FAKULTAS EKONOMI  
UNIVERSITAS ISLAM RIAU  
PEKANBARU**

**2019**



**UNIVERSITAS ISLAM RIAU  
FAKULTAS EKONOMI**

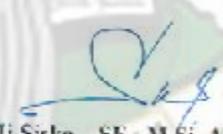
Alamat: Jalan Kaharudin Nasution No. 113 Perhentian Marpoyan  
Telp.(0761) 674681 fax.(0761)674834 PEKANBARU - 28284

**LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI**

NAMA : Nurul Hasanah  
NPM : 155310935  
FAKULTAS : EKONOMI  
JURUSAN : AKUNTANSI-S1  
JUDUL SKRIPSI : Analisis Penerapan Akuntansi Pada Desa Banglas Barat  
Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Kepulauan Meranti

Disahkan Oleh:

PEMBIMBING

  
Ili.Siska ., SE., M.Si.,Ak.,CA

Mengetahui :

DEKAN

KETUA PRODI AKUNTANSI S1

  
Drs. H. Abrar, M.Si.,AK.,CA

  
Dra. Eny Wahyuningsih, M.Si.,AK.,CA

## ABSTRAK

### **ANALISIS PENERAPAN AKUNTANSI PADA DESA BANGLAS BARAT KECAMATAN TEBING TINGGI KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI**

**NURUL HASANAH**  
**155310125**

Penerapan akuntansi dalam pemerintahan desa merupakan suatu hal yang penting untuk diperhatikan, karena akuntansi dapat digunakan sebagai alat pengatur dan pengendali untuk seluruh kegiatan keuangan. salah satu tujuan penerapan akuntansi adalah untuk mengatur dan melindungi kekayaan atau aset milik instansi yang bersangkutan.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah penerapan akuntansi pada Desa Banglas Barat Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Kepulauan Meranti telah sesuai dengan prinsip akuntansi berterima umum. Masalah yang ditemukan dalam penelitian ini yaitu tidak menghitung dan menyajikan penyusutan terhadap aset tetap.

Atas permasalahan yang ditemukan tersebut, penulis berupaya memperoleh data-data yang terkait berupa : buku kas umum, buku kas pembantu pajak, buku bank desa, laporan realisasi. Selanjutnya data-data yang diperoleh tersebut dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif yaitu penelitian yang proses pengumpulan datanya memungkinkan peneliti menghasilkan deskripsi tentang fenomena desa yang diteliti.

Dari analisis data yang dilakukan oleh penulis atau masalah yang ditemukan dalam penelitian ini, diperoleh hasil bahwa penerapan akuntansi pada desa Banglas Barat Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Kepulauan Meranti belum sesuai dengan prinsip akuntansi berterima umum. Sehingga dari hasil penelitian tersebut penulis mencoba memberikan masukan, solusi serta saran-saran bagi desa Banglas Barat Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Kepulauan Meranti dimasa yang akan datang diharapkan pelaksanaan keuangan akan lebih baik.

Kata kunci : Akuntansi dan Dana Desa

## ABSTRACT

### **ANALISIS PENERAPAN AKUNTANSI PADA DESA BANGLAS BARAT KECAMATAN TEBING TINGGI KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI**

**NURUL HASANAH**  
**155310125**

The application of accounting in village governance is an important thing to consider, because accounting can be used as a regulator and controller for all financial activities. one of the objectives of applying accounting is to regulate and protect the assets or assets of the relevant agencies.

The purpose of this study was to determine whether the application of accounting in the West Banglas Village, Tebing Tinggi Subdistrict, Kepulauan Meranti Regency was in accordance with generally accepted accounting principles. The problem found in this research is not counting and presenting depreciation of fixed assets.

For the problems found, the author seeks to obtain related data in the form of: general cash book, tax assistant tax book, village bank book, realization report. Furthermore, the data obtained were analyzed using descriptive methods, namely research whose data collection process allows researchers to produce a description of the phenomenon of the village under study.

From the data analysis conducted by the writer or the problem found in this study, it was obtained that the application of accounting in the village of West Banglas, Tebing Tinggi Subdistrict, Kepulauan Meranti Regency was not in accordance with generally accepted accounting principles. So from the results of the study the author tries to provide input, solutions and suggestions for the village of West Banglas, Tebing Tinggi District, Kepulauan Meranti Regency in the future it is expected that financial implementation will be better.

Keywords: Accounting and Village Funds

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya kepada penulis sehingga penulis bisa menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul “**Analisis Penerapan Akuntansi Pada Desa Banglas Barat Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Kepulauan Meranti.**”

Penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Riau. Pada kesempatan ini penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari sempurna. Untuk itu penulis menerima saran dan kritik guna mencapai skripsi yang sempurna.

Didalam penulisan skripsi ini telah melibatkan banyak pihak yang sangat membantu dalam banyak hal. Maka dari itu, disini penulis sampaikan rasa terimakasih sebanyak-banyaknya kepada:

1. Teristimewa orang tua tercinta Ibunda **Sabariah** dan Ayahanda **Syahrudin** yang tidak pernah berhenti bersabar dalam menghadapi anaknya, yang selalu memberikan doa, motivasi, nasehat, serta dukungan untuk penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Bapak **Prof. Dr. H. Syafrinaldi, SH., MCL** selaku Rektor Universitas Islam Riau.
3. Bapak **Drs. Abrar, M.Si., AK., CA** selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Riau.

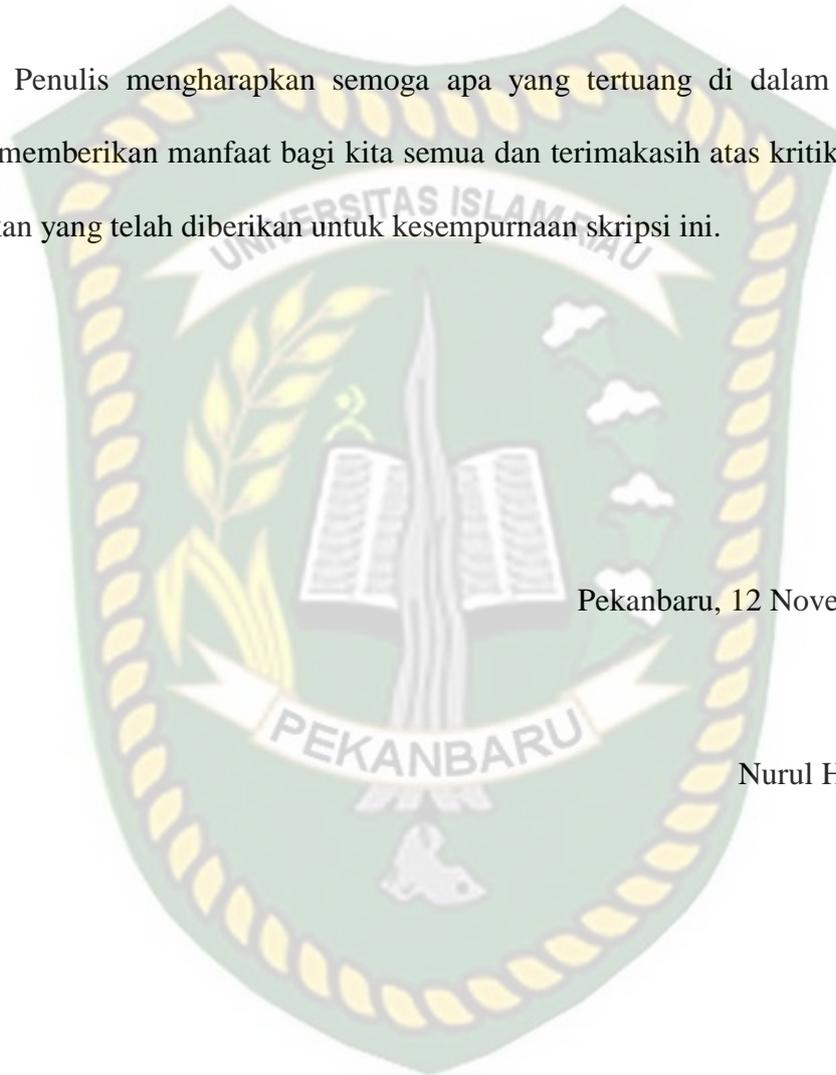
4. Ibu **Eny Wahyuningsih, M.Si., Ak., CA** selaku Ketua Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Riau.
5. Ibu **Hj. SISKA, SE., M.Si., Ak. CA** selaku pembimbing yang dengan kesabarannya memberikan pengarahan, masukan, dan bimbingan dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini hingga selesai.
6. Seluruh dosen, karyawan, dan staf Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Riau, atas segala ilmu dan bantuannya.
7. Bapak Kepala Desa Asnawi Nazar, S.PI serta petugas Desa yang telah mengizinkan penulis untuk meneliti pada Desa Banglas Barat dan telah membantu penulis untuk melengkapi dan memberikan informasi yang dibutuhkan penulis.
8. Untuk abangku Wahyu Kurniawan yang selalu menyemangati dan membantu dalam segala hal.
9. Untuk Sahabat ku Ruth Nita Ulli, Ambar Widhi, Dwi Syaputri dan Putri Ananda terimakasih kasih selalu ada disaat suka dan duka. Selalu memberi dukungan..
10. teman-teman (sefakultas, seasrama dan sekampung) penulis ucapkan terima kasih atas motivasi dan semangat yang telah diberikan selama ini.
11. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah mendukung penulisan skripsi ini.

Semoga Allah memberikan balasan atas semua bantuan dan kebaikan yang telah kalian berikan kepada penulis, serta selalu memberkati dan melindungi kita semua. Amin.

Penulis mengharapkan semoga apa yang tertuang di dalam skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua dan terimakasih atas kritik, saran dan masukan yang telah diberikan untuk kesempurnaan skripsi ini.

Pekanbaru, 12 November 2019

Nurul Hasanah



## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>x</b>
<b>BAB I     PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Perumusan Masalah .....	4
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	4
D. Sistem Penelitian.....	5
<b>BAB II    TELAAH PUSTAKA DAN HIPOTESIS .....</b>	<b>7</b>
A. Telaah Pustaka .....	7
1. Pengertian Akuntansi .....	7
2. Pengertian Desa.....	8
3. Otonomi Desa.....	8
4. Kewenangan Pemerintahan Desa.....	8
5. Pengertian Keuangan Desa .....	9
6. Prinsip-prinsip Akuntansi.....	9
7. Tujuan dan Penggunaan Akuntansi Pada Pemerintahan Desa.....	11
8. Sistem Pencatatan dan Dara Pengakuan Akuntansi Pada	

Pemerintahan Desa.....	13
9. Siklus Akuntansi Keuangan Desa .....	15
10. Pengelolaan Keuangan Desa .....	17
11. Proses Pengelolaan Keuangan Desa.....	17
12. Asas Pengelolaan Keuangan Desa .....	18
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) .....	19
14. Tujuan Laporan Keuangan .....	21
15. Tahapan Pembuatan Laporan Keuangan.....	22
B. Hipotesis .....	23
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>24</b>
A. Lokasi/Objek Penelitian.....	24
B. Jenis dan Sumber Data .....	24
1. Data Primer .....	24
2. Data Sekunder .....	24
C. Teknik Pengumpulan Data .....	24
1. Wawancara.....	24
2. Dokumentasi .....	24
D. Analisis Data .....	25
<b>BAB IV GAMBARAN UMUM DESA BANGLAS BARAT .....</b>	<b>26</b>
A. Sejarah Desa dan Kepenghuluan.....	26
B. Susunan Organisasi Tata Pemerintahan Desa Banglas Barat .....	28
C. Visi dan Misi .....	30
<b>BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>32</b>

A. Sistem Pencatatan dan Dasar Pengakuan Akuntansi .....	32
B. Proses Akuntansi Desa Banglas Barat .....	32
1. Tahap Pencatatan .....	33
2. Tahap Penggolongan.....	35
3. Tahap Pngikhtisaran.....	36
4. Tahap Penyesuaian.....	37
5. Tahap Pelaporan.....	39
<b>BAB VI    PENUTUP .....</b>	<b>43</b>
A. Kesimpulan .....	43
B. Saran.....	43
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN</b>	

## DAFTAR GAMBAR

Gambar IV.1 .....29



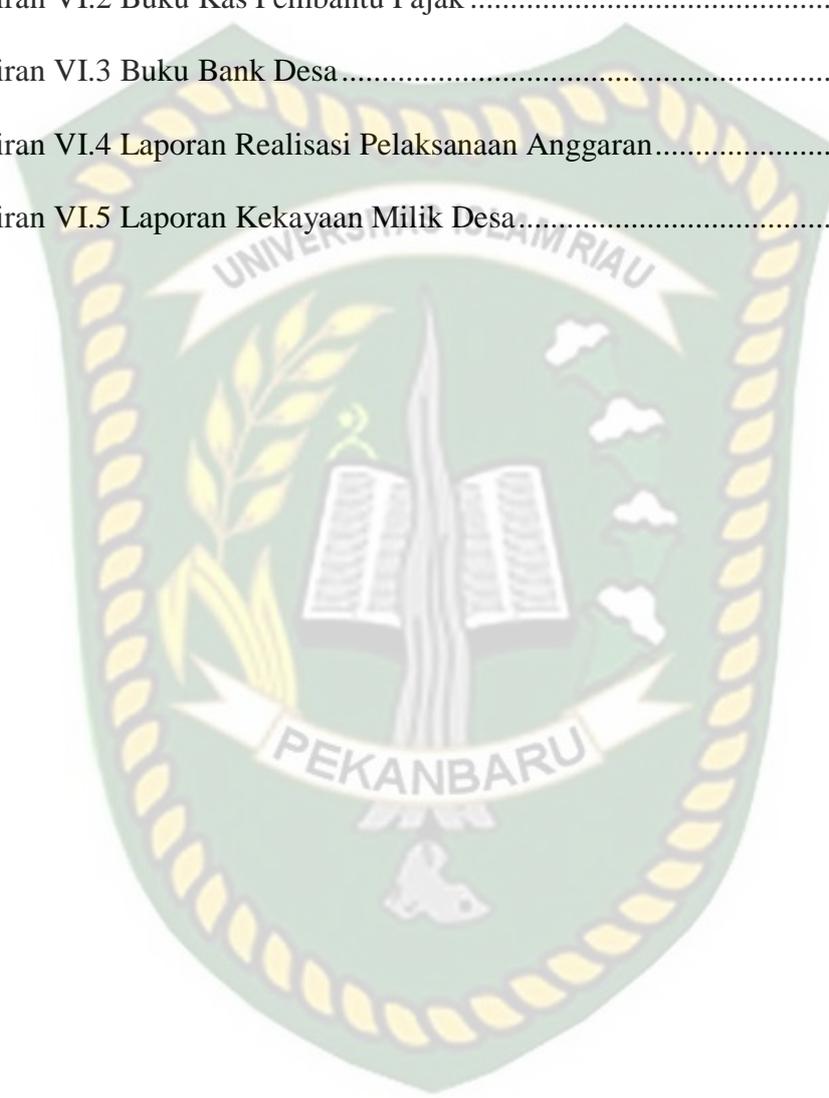
Dokumen ini adalah Arsip Miik :  
**Perpustakaan Universitas Islam Riau**

## DAFTAR TABEL

Tabel V.1 Buku Kas Umum.....	33
Tabel V.2 Buku Bank Desa.....	34
Tabel V.3 Buku Kas Pembantu Pajak.....	35
Tabel V.4 Buku Besar.....	36
Tabel V.5 Buku Besar.....	37
Tabel V.6 Neraca Saldo.....	37
Tabel V.7 LRPA Pendapatan dan Belanja Desa.....	40
Tabel V.8 Laporan Kekayaan Milik Desa.....	41
Tabel V.9 Perbandingan Aset Tetap dan LRA.....	42

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran VI.1 Buku Kas Umum .....	44
Lampiran VI.2 Buku Kas Pembantu Pajak .....	45
Lampiran VI.3 Buku Bank Desa .....	46
Lampiran VI.4 Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran.....	47
Lampiran VI.5 Laporan Kekayaan Milik Desa.....	48



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. LATAR BELAKANG MASALAH

Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan Keuangan Desa mendefinisikan Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sistem akuntansi keuangan dalam sebuah instansi pemerintah merupakan suatu hal yang penting untuk diperhatikan. Hal ini karena sistem akuntansi keuangan dapat digunakan sebagai alat pengatur dan pengendalian untuk seluruh kegiatan keuangan. Penerapan sistem akuntansi bertujuan untuk mengatur dan melindungi kekayaan atau aset milik instansi yang bersangkutan. Selain itu sistem akuntansi keuangan juga berfungsi sebagai alat untuk mengecek ketelitian serta ketepatan data akuntansi, disamping itu juga untuk mendukung terciptanya efisiensi serta efektivitas dan kepatuhan seluruh aparat dalam instansi tersebut terhadap kebijakan-kebijakan yang diterapkan oleh instansi masing-masing.

Menurut IAI-KASP 2015 Akuntansi adalah suatu kegiatan dalam mencatat data keuangan sehingga menjadi sebuah informasi yang berguna bagi pemakainya. Siklus akuntansi merupakan gambaran tahapan kegiatan akuntansi yang meliputi tahap pencatatan berawal dari bukti-bukti transaksi selanjutnya

dilakukan pencatatan ke dalam buku yang sesuai, tahap penggolongan merupakan tahap mengelompokkan catatan bukti transaksi ke dalam kelompok buku besar sesuai dengan nama akun dan saldo-saldo yang telah dicatat dan dinilai ke dalam kelompok debit dan kredit, tahap pengikhtisaran dilakukan pembuatan neraca saldo dan kertas kerja, dan tahap pelaporan.

Prinsip Akuntansi Berterima Umum (PABU) memberi pedoman tentang akuntansi, yaitu: a) Pengukuran atau penilaian adalah penentuan jumlah rupiah sebagai unit pengukuran suatu objek yang terlibat dalam suatu transaksi keuangan. b) Pengakuan ialah suatu jumlah rupiah kedalam sistem akuntansi sehingga jumlah tersebut akan mempengaruhi suatu post dan terefleksi dalam laporan keuangan. c) Penyajian/pengungkapan berarti pembeberan hal-hal informative yang di anggap penting dan bermanfaat bagi pemakai selain apa yang dapat dinyatakan melalui laporan keuangan utama dan cara-cara penyampaiannya. d) Pengauditan ialah membahas prinsip, prosedur, dan teknik pengauditan laporan keuangan untuk memberi pendapat tentang kewajaran penyajian laporan keuangan.

Tujuan akuntansi desa adalah menyediakan informasi keuangan yang lengkap dan bermanfaat bagi para pengguna laporan dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan, baik keputusan ekonomi, sosial, maupun politik. Untuk memenuhi tujuan-tujuan tersebut laporan keuangan desa menyediakan informasi mengenai pendapatan, belanja, pembiayaan, aset, kewajiban, ekuitas dana dan arus kas desa. Oleh karena itulah laporan keuangan desa berfungsi sebagai alat evaluasi karena menyediakan informasi posisi keuangan entitas tersebut serta

menunjukkan kinerja yang telah dilakukan sehingga nantinya akan menjadi bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan bagi kepala desa sendiri maupun pemangku kepentingan lainnya (pemerintah, BPD, dan masyarakat).

Desa Banglas Barat merupakan salah satu desa yang ada di Kabupaten Kepulauan Meranti, yang lebih tepatnya berada di Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Kepulauan Meranti. Proses akuntansi yang dilakukan oleh Desa Banglas Barat menggunakan sistem berbasis computer dimulai dari transaksi kemudian dicatat ke dalam Buku Kas Umum (Lampiran 1). Dalam buku kas umum terdapat kode rekening, penerimaan kas dan pengeluaran kas. Kemudian membuat Buku Kas Pembantu Pajak yang terdiri dari pemotongan, penyeteran, dan saldo (Lampiran 2) dan Buku Bank Desa (Lampiran 3) terdapat pemasukan dan pengeluaran. Lalu dibuatlah Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lampiran 4). Kemudian membuat Laporan Kekayaan Milik Desa (Lampiran 5) menyajikan aset dan kewajiban. Didalam aset lancar tersaji kas, piutang dan persediaan. Sedangkan pada aset tidak lancar terdapat investasi, aset tetap, dana cadangan, dan aset tidak lancar lainnya.

Laporan Kekayaan Milik Desa menyajikan perbandingan anggaran pada tahun 2017 dengan tahun sebelumnya. Dari perbandingan dua tahun tersebut ditemukan permasalahan. Laporan Kekayaan Milik Desa Banglas Barat Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Kepulauan Meranti pada tahun 2016 menyajikan saldo keseluruhannya bernilai Rp 0, sedangkan pada tahun 2017 jumlah aset lancar bernilai Rp 0. Aset tetap yang disajikan pada Laporan Kekayaan Milik Desa merupakan aset tetap yang diperoleh pada tahun yang

bersangkutan. Saldo yang disajikan di Laporan Kekayaan Milik Desa Banglas Barat Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Kepulauan Meranti tahun 2017 tidak muncul pada tahun sebelumnya sehingga Laporan Kekayaan Milik Desa tersebut tidak seimbang.

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul : “Analisis Penerapan Akuntansi Pada Desa Banglas Barat Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Kepulauan Meranti”.

### **B. Perumusan Masalah**

Rumusan masalah dalam penelitian ini berdasarkan uraian latar belakang diatas adalah :

“Bagaimana Kesesuaian Penerapan Akuntansi Pada Desa Banglas Barat Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Kepulauan Meranti Dengan prinsip Akuntansi Berterima Umum”.

### **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Adapun tujuan dilakukan penelitian ini adalah untuk mengetahui kesesuaian antara Penerapan Akuntansi Pada Desa Banglas Barat Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Kepulauan Meranti dengan Prinsip Akuntansi Berterima Umum.

Sedangkan manfaat yang didapat dari penelitian ini adalah :

- a. Menambah wawasan penulis dibidang akuntansi keuangan desa.
- b. Bagi Desa Banglas Barat Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Kepulauan Meranti hasil penelitian ini merupakan masukan yang dapat digunakan untuk perbaikan-perbaikan dalam penyempurnaan pelaksanaan akuntansi keuangan desa.

c. Menjadi referensi dalam penelitian yang sama.

#### **D. Sistematika Penelitian**

Sistematika penulisan dibagi atas 6 (enam) bab, dengan rincian masing-masing bab sebagai berikut :

##### **BAB I : PENDAHULUAN**

Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penelitian.

##### **BAB II : TELAAH PUSTAKA DAN HIPOTESIS**

Bab ini berisi tentang landasan teori dan pengembangan hipotesis, menjelaskan teori-teori yang telah diperoleh melalui tinjauan pustaka dari berbagai literatur yang berkaitan dengan masalah penelitian.

##### **BAB III : METODE PENELITIAN**

Bab ini mengikuti lokasi/objek penelitian, jenis dan sumber data teknik pengumpulan data serta analisis data.

##### **BAB IV : GAMBARAN UMUM (OBJEK PENELITIAN)**

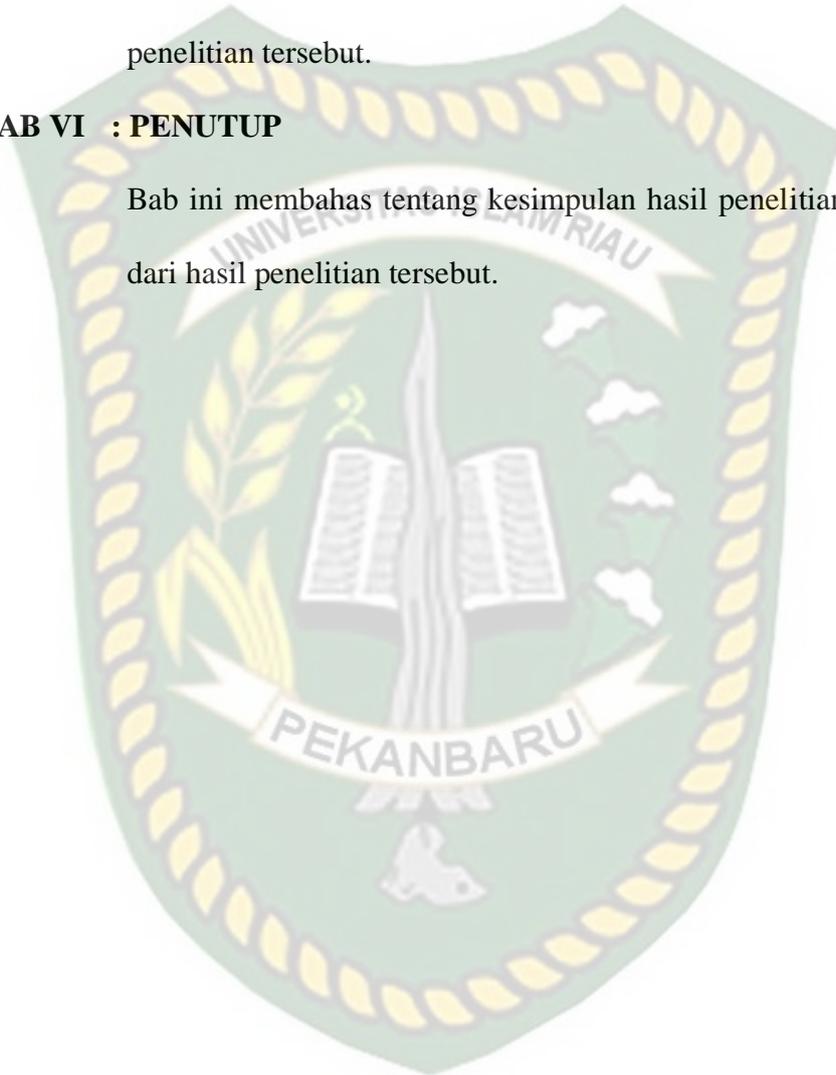
Pada bab ini membahas mengenai gambaran umum mengenai pemerintahan desa, Struktur Organisasi, dan Visi dan Misi Pembangunan Desa.

## **BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab ini menguraikan tentang hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, Menganalisis dan Mengevaluasi Hasil penelitian tersebut.

## **BAB VI : PENUTUP**

Bab ini membahas tentang kesimpulan hasil penelitian dan saran dari hasil penelitian tersebut.



## BAB II

### TELAAH PUSTAKA DAN HIPOTESIS

#### A. Telaah Pustaka

##### 1. Pengertian Akuntansi

Menurut Hans Kartikahadi, dkk (2016:6) akuntansi adalah:

“Suatu sistem informasi keuangan, yang bertujuan untuk menghasilkan dan melaporkan informasi yang relevan bagi berbagai pihak yang berkepentingan.”

Menurut *American Accounting Assosiation* dalam buku H. Lili M. Sadeli (2009:2) akuntansi adalah:

“Proses mengidentifikasi, mengukur dan melaporkan informasi ekonomi untuk membuat pertimbangan dan mengambil keputusan yang tepat bagi pemakai tersebut.”

Menurut Wild dan Kuok dalam Sukrisno Agoes, Estralita Trisnawati (2013:1) pengertian akuntansi adalah :

“Sistem informasi yang menghasilkan laporan kepada pihak-pihak yang berkepentingan mengenai aktivitas ekonomi dan kondisi perusahaan.”

Berdasarkan pengertian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa informasi akuntansi diharapkan dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan ekonomi dengan cara mencatat, menggolongkan , mengikhtisarkan transaksi yang bersifat keuangan dalam bentuk laporan keuangan.

## 2. Pengertian Desa

Kamus Besar Bahasa Indonesia mengartikan desa adalah kesatuan wilayah yang dihuni oleh sejumlah keluarga yang mempunyai sistem pemerintahan sendiri (dikepalai oleh seorang kepala desa) atau desa merupakan kelompok rumah di luar kota yang merupakan kesatuan.

Menurut Rosalinda (2014) desa sebagai :

“Bagian dari sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diakui otonominya dan Kepala Desa melalui pemerintahan desa dapat diberikan penugasan pendelegasian dari pemerintahan atau pun pemerintahan daerah untuk melaksanakan urusan pemerintahan tertentu. Landasan pemikiran dalam peraturan mengenai desa adalah keanekaragaman, patisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat.”

## 3. Otonomi Desa

Menurut Nurcholis (2011: 21) menyatakan bahwa :

Desa yang disebut otonom adalah desa dengan pengaturan rumah tangga.

Otonomi desa merupakan hak, wewenang dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat berdasarkan hak asal-usul dan nilai-nilai sosial budaya yang ada pada masyarakat untuk tumbuh dan berkembang mengikuti perkembangan desa tersebut.

## 4. Kewenangan Pemerintahan Desa

Pemerintahan Desa terdiri dari Kepala Desa dan Perangkat Desa, yang meliputi Sekretaris Desa dan lainnya. Struktur organisasi sebagai berikut :

### a. Kepala Desa

Kepala desa adalah pemerintah desa atau yang disebut dengan nama lain yang dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa (UU RI No Tahun 2014 Pasal 1 Ayat 3). Kepala desa bertugas menyelenggarakan

pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa (UU RI No 6 Tahun 2014 Pasal 26 Ayat 1).

b. Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis (UU RI No 6 Tahun 2014 Pasal 1 Ayat 4 Tentang UU Desa).

c. Sekretaris

Merupakan perangkat desa yang bertugas membantu kepala desa untuk mempersiapkan dan melaksanakan pengelolaan administrasi desa, mempersiapkan bahan penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintah desa.

### **5. Pengertian Akuntansi Desa**

Akuntansi desa adalah pencatatan dari proses transaksi yang terjadi didesa, dibuktikan dengan nota-nota kemudian dilakukan pencatatan dan pelaporan keuangan sehingga akan menghasilkan informasi dalam bentuk laporan keuangan yang digunakan pihak-pihak yang berhubungan dengan desa.

“Menurut permendagri No 113 tahun 2014 pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa”.

### **6. Prinsip-prinsip Akuntansi**

Prinsip akuntansi adalah sebuah nilai-nilai yang dijadikan panutan dan dipatuhi oleh pembuat standar akuntansi. Namun pada kenyataannya prinsip

akuntansi bukan merupakan parameter wajib. Hal itu dikarenakan prinsip akuntansi pada hakikatnya mengawasi dan memberikan rambu-rambu dengan ketentuan yang jelas dan sudah diakui kebenarannya. Dengan mematuhi prinsip-prinsip akuntansi dalam membuat laporan keuangan, maka akan memudahkan pihak pembuat dan pihak eksternal untuk membaca dan membandingkan dengan laporan keuangan pemerintah Desa lainnya.

Ada beberapa prinsip akuntansi yang digunakan :

a) Prinsip Harga Perolehan

Prinsip ini mempunyai aturan bahwa harga perolehan dari harta (aset), kewajiban/utang, dan pendapatan dihitung dari harga perolehan sesuai dengan kesepakatan oleh kedua belah pihak yang bertransaksi. Harga perolehan ini bernilai objek sesuai dengan nilai uang yang dikeluarkan/dibayarkan dari kas/bank.

b) Prinsip Realisasi Pendapatan

Prinsip ini merupakan pembahasan mengenai bagaimana mengukur dan menentukan nilai dari pendapatan yang diperoleh. Pengukuran pendapatan dapat diukur dengan penambahan harta (aset) dan berkurangnya utang atau bertambahnya jumlah kas. Pencatatan pendapatan pada pemerintahan desa pada dasarnya dilakukan pada saat terjadinya transaksi dan dapat dilihat berdasarkan jumlah kas yang diterima.

c) Prinsip Objektif

Prinsip ini mengarah pada laporan keuangan yang didukung oleh bukti-bukti transaksi yang ada. Jika tidak ada bukti transaksi, maka tidak ada pencatatan

transaksi. Prinsip ini memerlukan pengawasan dan pengendalian pihak intern untuk menghindari terjadinya kecurangan-kecurangan untuk memanipulasi bukti transaksi dan pencatatannya.

d) Prinsip Pengungkapan Penuh

Dalam pembuatan laporan keuangan hendaknya mengungkapkan sebuah informasi penuh yang tersaji dengan baik secara kualitatif dan kuantitatif yang dapat mempengaruhi keputusan.

e) Prinsip Konsistensi

Dalam pembuatan laporan keuangan harus mempunyai nilai konsisten dalam menggunakan metode, pedoman dan standar dalam pembuatannya. Laporan keuangan juga harus mempunyai nilai banding, yang artinya laporan keuangan dapat dibandingkan dengan pemerintah desa lainnya dengan periode yang sama atau sebaliknya.

## 7. Tujuan dan Penggunaan Akuntansi pada Pemerintahan Desa

a. Tujuan Akuntansi

Tujuan utama akuntansi adalah memberikan informasi keuangan (*kuantitatif*) dari suatu kesatuan ekonomi (*business enterprise*) kepada pihak-pihak yang berkepentingan (*user*), baik intern maupun eksternal.

1. Bagi pihak internal (manajemen)

Keuangan akuntansi adalah untuk membantu manajemen dalam menjalankan fungsi manajemen terutama dalam bidang :

1) Perencanaan

Berdasarkan informasi akuntansi, pemilik perusahaan atau manajemen dapat membuat rencana kegiatan atau anggaran untuk pelaksanaan kegiatan pada masa yang akan datang.

## 2) Pengendalian

Setelah rencana dan anggaran akuntansi dibuat akuntansi bertugas memantau apakah pelaksanaannya sesuai dengan yang telah direncanakan atau dianggarkan atau adanya penyimpangan. Jika ada penyimpangan, akuntansi akan menganalisis penyimpangan tersebut dan menyajikan informasi penyebab terjadinya penyimpangan. Manajemen akan mempertimbangkan tindakan koreksi yang diperlukan akibat adanya penyimpangan tersebut.

## 3) Pertanggungjawaban

Informasi keuangan (berupa laporan keuangan) pada akhirnya periode akan disampaikan oleh manajemen kepada para pengguna untuk dilakukan penilaian. Manajemen puncak melakukan penilaian kinerja manajemen bawahannya (seperti manajemen divisi) juga berdasarkan informasi akuntansi.

## 2. Bidang pihak eksternal

Informasi akuntansi digunakan sebagai alat bantu dalam mengambil keputusan (*decision making*). Misalnya bagi calon investor informasi akuntansi berguna untuk menilai apakah ia akan menanamkan modalnya pada perusahaan tersebut. Bagi kreditur berkepentingan untuk menilai apakah suatu perusahaan layak untuk diberi pinjaman atau tidak, dan sebagai alat untuk menilai perkembangan setelah memperoleh pinjaman.

### b. Pengguna Akuntansi

Menurut Ikatan Akuntansi Indonesia Tahun 2015 pihak-pihak yang membutuhkan dan senantiasa menggunakan informasi akuntansi, diantaranya :

1. Pihak Internal

Pihak Internal adalah pihak yang berada didalam struktur organisasi desa, yaitu Kepala Desa, Sekretaris Desa, Bendahara, dan Kepala Urusan/Kepala Seksi.

2. Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang mempunyai tugas untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan APBDesa.

3. Pemerintah

Dalam hal ini baik Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota mengingat bahwa anggaran Desa berasal baik APBN dan APBD melalui transfer, bagi hasil dan bantuan keuangan.

4. Pihak lainnya

Selain pihak-pihak yang telah disebutkan sebelumnya, masih banyak lagi pihak yang kemungkinan untuk melihat laporan keuangan Desa, misalnya Lembaga Swadaya Desa, RT/RW, dan sebagainya.

## **8. Sistem Pencatatan dan Dasar Pengakuan Akuntansi Pada Pemerintahan Desa**

a. Sistem Pencatatan

Menurut Abdul Halim (2012:44), Akuntansi adalah:

“Proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan dan pelaporan transaksi ekonomi (keuangan) dari suatu organisasi. Yang dimaksud pengidentifikasian adalah pengidentifikasian transaksi ekonomi, agar dapat membedakan yang mana transaksi yang bersifat ekonomi dan mana yang tidak. Pada dasarnya ekonomi adalah aktivitas yang berhubungan dengan uang. Proses selanjutnya adalah pengukuran transaksi ekonomi, yaitu dengan menggunakan satuan

uang. Jadi, semua transaksi didalam akuntansi harus dinyatakan dalam satuan uang. Proses berikutnya adalah pencatatan ekonomi, yaitu pengolahan data transaksi ekonomi tersebut melalui penambahan dan atau pengurangan atas sumber daya yang ada. Pelaporan transaksi ekonomi akan menghasilkan laporan keuangan yang merupakan hasil akhir proses akuntansi.”

Dalam buku Abdul Halim dan Muhammad Syam Kusufi (2012:45-51) Ada beberapa sistem pencatatan yang dapat digunakan yaitu :

1. *Single entry*

Sistem pencatatan *single entry* sering juga disebut dengan sistem pencatatan tata buku tunggal atau tata buku saja. Dalam sistem ini, pencatatan transaksi ekonomi dilakukan dengan mencatat satu kali. Transaksi yang berakibat bertambahnya kas akan dicatat pada sisi penerimaan dan transaksi yang berakibat berkurangnya kas akan dicatat pada sisi pengeluaran.

2. *Double entry*

Sistem pencatatan *double entry* juga sering disebut dengan tata buku berpasangan. Pencatatan dengan sistem ini ada sisi debit dan kredit. Setiap pencatatan harus menjaga keseimbangan persamaan dasar akuntansi. Persamaan dasar akuntansi tersebut berbentuk sebagai berikut :

$$\text{ASET} + \text{BEBAN} = \text{UTANG} + \text{EKUITAS} + \text{PENDAPATAN}$$

3. *Triple entry*

Sistem pencatatan *triple entry* adalah pelaksanaan pencatatan dengan menggunakan sistem pencatatan *double entry*, ditambah dengan pencatatan buku anggaran. Sementara system pencatatan *double entry* dijalankan, sub bagian pembukuan (bagi keuangan) pemerintah daerah juga mencatat transaksi tersebut pada buku anggaran, sehingga pencatatan tersebut akan efektif pada sisi anggaran.

a. Dasar Pengakuan Akuntansi Keuangan Daerah

Dasar pengakuan adalah kapan suatu transaksi dicatat. Untuk menentukan kapan transaksi dicatat digunakan berbagai sistem/basis/dasar akuntansi.

“Dalam buku Abdul Halim dan Muhammad Syam Kusufi (2012:5-55) dasar akuntansi terbagi empat yaitu” :

1) Basis kas (*cash basis*)

Basis kas, seperti telah diuraikan sebelumnya menetapkan bahwa pengakuan/pencatatan transaksi ekonomi hanya dilakukan apabila transaksi tersebut menimbulkan perubahan atau berakibat pada kas, apabila transaksi tersebut menimbulkan perubahan kas, maka transaksi tersebut tidak dicatat.

2) Basis akrual (*accrual basis*)

Basis akrual adalah dasar akuntansi yang mengakui transaksi dan peristiwa itu terjadi dan bukan hanya saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Oleh karena itu, transaksi-transaksi dan peristiwa-peristiwa dicatat dalam catatan akuntansi dan diakui dalam pelaporan keuangan pada periode terjadinya.

3) Basis kas modifikasian (*modified cash basis*)

Basis kas modifikasian mencatat transaksi selama tahun anggaran dan melakukan penyesuaian pada tahun anggaran berdasarkan basis akrual.

4) Basis akrual modifikasian (*modified accrual basis*)

Basis akrual modifikasian mencatat transaksi dengan menggunakan basis kas untuk transaksi-transaksi tertentu dan menggunakan basis akrual untuk sebahagian besar transaksi. Pembatasan penggunaan dasar akrual dilandasi oleh pertimbangan kepraktisan.

## 9. Siklus Akuntansi Keuangan Desa

“Menurut IAI-KASP 2015 siklus akuntansi merupakan gambaran tahapan kegiatan akuntansi yang meliputi” :

### 1. Tahap Pencatatan

Tahap ini merupakan langkah awal dari siklus akuntansi. Berawal dari bukti-bukti transaksi selanjutnya dilakukan pencatatan kedalam buku yang sesuai.

### 2. Tahap Penggolongan

Tahap selanjutnya setelah dilakukan pencatatan berdasarkan bukti transaksi adalah tahap penggolongan. Tahap penggolongan merupakan tahap mengelompokkan catatan bukti transaksi ke dalam kelompok buku besar sesuai dengan nama akun dan saldo-saldo yang telah dicatat dan dinilai ke dalam kelompok debit dan kredit.

### 3. Tahap Pengikhtisaran

Pada tahap ini dilakukan pembuatan neraca saldo dan kertas kerja. Laporan Kekayaan Milik Desa berisi saldo akhir akun-akun yang telah dicatat di buku besar utama dan buku besar pembantu. Laporan Kekayaan Milik Desa dapat berfungsi untuk mengecek keakuratan dalam memposting akun ke dalam debit dan kredit. Di dalam Laporan Kekayaan Milik Desa jumlah kolom debit dan kredit harus sama dan seimbang. Sehingga perlunya pemeriksaan saldo debit dan kredit di dalam Laporan Kekayaan Milik Desa dari waktu ke waktu untuk menghindari salah pencatatan. Dengan demikian, pembuktian ini bukan merupakan salah satu indikasi bahwa pencatatan telah dilakukan dengan benar.

### 4. Tahap Pelaporan

Tahap ini merupakan tahap akhir dari siklus akuntansi. Kegiatan yang dilakukan pada tahap ini :

a. Membuat Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa. Laporan ini berisi jumlah anggaran dan realisasi dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan dari pemerintah desa yang bersangkutan untuk tahun anggaran tertentu.

b. Laporan Kekayaan Milik Desa.

Laporan yang berisi posisi aset lancar, aset tidak lancar, dan kewajiban pemerintah desa per 31 Desember tahun tertentu.

#### **10. Pengelolaan Keuangan Desa**

Pengertian Keuangan Desa menurut UU desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Hak dan kewajiban tersebut menimbulkan pendapatan, belanja, pembiayaan yang perlu diatur dalam pengelolaan keuangan desa yang baik.

“Menurut Permendagri No 113 Tahun 2014 Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa”.

#### **11. Proses Pengelolaan Keuangan Desa**

a. Perencanaan

Pemerintahan desa menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangannya dengan memacu pada perencanaan pembangunan kabupaten dan

kota. Rencana pembangunan desa disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan.

b. Pelaksanaan

Dalam pelaksanaan anggaran desa yang telah ditetapkan sebelumnya timbul transaksi penerimaan dan pengeluaran desa. Semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa. Jika desa yang belum memiliki layanan perbankan diwilayah maka pengaturannya ditetapkan oleh pemerintah kabupaten/kota. Semua penerimaan dan pengeluaran desa harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah.

c. Penatausahaan

Penatausahaan Keuangan Desa adalah kegiatan pencatatan yang khususnya dilakukan oleh Bendahara Desa. Kepala Desa dalam melaksanakan unsur yang dicakup oleh pelaporan arus kas terdiri dari penerimaan kas dan pengeluaran kas. Penatausahaan keuangan desa harus menetapkan Bendahara desa. Penetapan Bendahara Desa harus dilakukan sebelum dimulainya tahun anggaran bersangkutan dan berdasarkan keputusan Kepala Desa. Sedangkan Bendahara adalah perangkat desa yang ditunjuk Kepala Desa untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, membayar dan bertanggungjawabkan keuangan desa dalam rangka pelaksanaan APBDes.

## 12. Asas Pengelolaan Keuangan Desa

Keuangan desa dikelola berdasarkan praktik-praktik pemerintahan yang baik. Asas-asas pengelolaan keuangan desa sebagaimana tertuang dalam Permendagri

Nomor 113 Tahun 2014 yaitu Transparan, akuntabel, partisipatif, serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran, dengan uraian sebagai berikut :

a) Transparan

Transparan yaitu prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat mengetahui dan mendapat akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan desa.

b) Akuntabel

Akuntabel yaitu perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Asas akuntabel yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

c) Partisipatif

Partisipatif yaitu penyelenggaraan pemerintahan desa yang mengikutsertakan kelembagaan desa dan unsur masyarakat desa.

d) Tertib dan disiplin anggaran

Tertib dan disiplin anggaran yaitu pengelolaan keuangan desa harus mengacu pada aturan atau pedoman yang melandasinya.

### **13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes)**

Menurut “Sumpeno (2012:213) anggaran pendapatan dan belanja desa adalah Suatu rencana keuangan tahunan desa yang ditetapkan berdasarkan peraturan desa yang mengandung prakiraan sumber pendapatan dan belanja untuk mendukung kebutuhan program pembangunan desa yang bersangkutan”.

a. Pendapatan Desa

Pendapatan Desa meliputi semua penerimaan uang melalui Rekening Kas Desa yang merupakan hak desa dalam 1 tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa.

Pendapatan desa terdiri sesuai pasal 72 UU Desa bersumber dari :

a) Pendapatan Asli Desa (PADes)

Kelompok PADes terdiri atas jenis :

1. Hasil Usaha, misalnya hasil BUM Desa, tanah kas desa
2. Hasil asset, misalnya tambatan perahu, pasar desa, tempat pemandian umum dan jaringan irigasi.
3. Swadaya, partisipasi dan gotong royong misalnya adalah membangun dengan kekuatan sendiri yang melibatkan peran serta masyarakat berupa tenaga dan barang yang dinilai dengan uang.
4. Lain-lain Pendapatan Asli Desa, antara lain hasil pemungutan desa.

b) Pendapatan Transfer Desa

Kelompok Transfer terdiri atas jenis : Dana Desa, Bagian dari Hasil Pajak Daerah Kabupaten/Kota dan Retribusi Daerah, Alokasi Dana Desa (ADD), Bantuan Keuangan APBD Provinsi, dan Bantuan Keuangan APBD Kabupaten/Kota.

b. Belanja Desa

Belanja Desa merupakan semua pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa. Belanja desa dipergunakan dalam rangka mendanai penyelenggaraan kewenangan desa. Belanja desa yang ditetapkan dalam

APB Desa sesuai pasal 1 PP No 43 Tahun 2014. Klasifikasi belanja berdasarkan jenis terdiri dari Belanja Pegawai, Belanja barang/jasa, dan Belanja Modal. Sedangkan belanja desa menurut kelompok terdiri dari: Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa, Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa, Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa, dan Bidang Tak Terduga.

c. Pembiayaan Desa

pembiayaan meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan diklasifikasikan menurut kelompok dan jenis. Pembiayaan desa berdasarkan kelompok terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.

#### 14. Tujuan Laporan Keuangan

Secara fisik, tujuan pelaporan keuangan pemerintah adalah untuk menyediakan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya, dengan (PAAP01) :

1. Menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, kewajiban dan ekuitas dana pemerintah.
2. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi, kewajiban dan ekuitas dana pemerintah.
3. Menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya ekonomi.

4. Menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggaran.
5. Menyediakan informasi mengenai potensi pemerintah untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintah.
6. Menyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya.
7. Menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan entitas pelaporan dalam mendanai aktivitasnya.

#### **15. Tahapan Pembuatan Laporan Keuangan**

Menurut “Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tahap dalam pembuatan laporan keuangan desa adalah sebagai berikut” :

1. Membuat rencana berdasarkan visi yang dituangkan dalam penyusunan anggaran.
2. Anggaran yang dibuat terdiri dari akun pendapatan, belanja dan pembiayaan. Setelah anggaran disahkan maka perlu dilaksanakan.
3. Dalam pelaksanaan anggaran timbul transaksi. Transaksi tersebut harus dilakukan pencatatan lengkap berupa pembuatan buku kas umum, buku kas pembantu, buku inventaris dengan disertai pengumpulan bukti transaksi-transaksi.
4. Untuk memperoleh informasi posisi keuangan, kemudian berdasarkan transaksi yang terjadi dapat dihasilkan sebuah neraca. Neraca ini fungsinya untuk mengetahui kekayaan/posisi keuangan desa.

#### **B. Hipotesis**

Berdasarkan latar belakang masalah dan telaah pustaka yang telah dikemukakan sebelumnya maka dapat dibuat hipotesis sebagai berikut: Penerapan

Akuntansi Pada Desa Banglas Barat Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Kepulauan Meranti belum sesuai dengan Prinsip Akuntansi berterima umum.



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Banglas Barat Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Kepulauan Meranti waktu pelaksanaan penelitian yang telah ditetapkan.

#### **B. Jenis dan Sumber Data**

Jenis data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah :

A. Data Primer adalah data yang didapat dari sumber pertama, berupa wawancara lisan pada bagian keuangan mengenai proses penyusunan laporan keuangan desa, pelaksanaan keuangan desa, proses pengawasan keuangan desa serta proses pengesahaan perhitungan keuangan desa.

B. Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari Desa Banglas Barat Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Kepulauan Meranti dalam bentuk jadi seperti, Laporan Keuangan, Struktur Organisasi, Sejarah Singkat, dan Visi Misi Desa Banglas Barat Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Kepulauan Meranti.

#### **C. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Wawancara yaitu teknik pengumpulan data dengan melakukan wawancara atau bertanya langsung kepada pihak-pihak yang ada hubungannya dengan penelitian ini.

2. Dokumentasi yaitu metode pengumpulan data dan informasi yang dilakukan dengan cara meneliti dokumen-dokumen yang diperoleh dari bagian keuangan.

#### **D. Teknik Analisis Data**

Dalam penyusunan penelitian ini, analisi data yang digunakan oleh penulis adalah metode deskriptif yaitu penelitian yang proses pengumpulan datanya memungkinkan peneliti untuk menghasilkan deskripsi tentang fenomena desa yang diteliti.



## BAB IV

### GAMBARAN UMUM DESA DESA BANGLAS BARAT KECAMATAN TEBING TINGGI KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI

#### A. Sejarah Desa dan Kepenghuluan

Pada masa dahulu desa Banglas Barat belumlah dikenal seperti sekarang ini, dulu lebih di kenal dengan sebutan Suir Kiri karena sungainya bercabang dua ada yang kiri dan ada yang kanan, yang kanan berada di kawasan desa Lalang Tanjung, sedangkan yang kiri baru ke Banglas Barat. Desa Banglas Barat berbatas sebelah utara dengan desa Banglas sebelah barat dengan desa Lalang Tanjung Sebelah timur dengan Desa Sungai Tohor dan sebelah selatan berbatas dengan desa Kepau Baru.

Desa Banglas Barat sebelumnya mempunyai beberapa orang Penghulu, pada masa dahulu di disebut penghulu Pertama yang ditunjuk adalah Almarhum Mumin setelah penghulu Mumin tidak bisa lagi bertugas maka ditunjukkan sebagai pengganti Almarhum Nin, karena pada masa dulu belum ada pemilihan siapa yang disukai masyarakat maka pemerintah Kabupaten Bengkalis akan mengangkatnya jadi penghulu dimasa itu. Setelah Penghulu Nin mengundurkan diri karena sudah tua maka diangkatlah almarhum Dun di zaman penghulun Almarhum Dun, belum juga ada kemajuan karena zaman Jepang beberapa tahun Almarhum Dun memimpin tak mampu lagi. Lalu ditunjuk pula penghulu Almarhum Berang yang disukai masyarakat, setelah beberapa tahun Almarhum Berang tak bisa lagi menjabat sebagai penghulu karena usianya sudah tua, pilihan masyarakat sebagai penghulu jatuh kepada Almarhum Penghulu Kotot Montel,

yaitu mulai tahun 1953. Penghulu Kotot Montel menjabat selama 20 tahun yaitu sekitar tahun 1953 sampai 1973 Penghulu Kotot Montel mengundurkan diri. Lalu masyarakat memilih Almarhum Sapi'i Lasa, di tahun 1991 Penghulu Sapi'I meninggal dunia, dilanjutkan oleh sekretarisnya yaitu Sahari sampai tahun 1995, pada tahun 1995 terjadi pemilihan kembali, pemilihan tersebut dimenangi oleh Saudara Mustapa Muhammad. Pada masa Kepala Desa Mustapa desa Banglas Barat sudah mulai menampakkan kemajuannya. Hal ini dilihat dari Jalan-jalan desa mulai diaspal, desa Banglas Barat dikenal juga lewat MTQ dan sepak bola. Pertumbuhan ekonomi juga ikut berkembang. Saudara Mustapa mampu menjadi kepala desa sampai tahun 2003. pada tahun 2003 diadakan Pemilihan Kepala Desa dan A. Rauf Kotot terpilih sebagai Kepala Desa Banglas Barat sampai pada tahun 2009, pada tahun 2009 diadakan pemilihan kembali, dan saudara A. Rauf kembali menang mutlak, menjadi Kepala Desa Banglas Barat sampai hari ini, Desa Banglas Barat makin berkembang seperti pendidikan sudah ada MTs, SMP dan transportasi pun sudah lancar.

## **B. Susunan Organisasi Tata Pemerintahan Desa Banglas Barat Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Kepulauan Meranti**

Nama-nama Aparatur Pemerintah Desa Banglas Barat :

Kepala Desa : ASNAWI NAZAR, S.PI  
Sekretaris Desa : H. MATORI H.UMAR

Staf Sekretariat : ENDRIYADI NURDIN  
MORI AFRIZAL H.K  
SITI ROHMAH

Bendahara Desa : HARJANTO, MT

Petugas Kantor : A. BAKAR, ZN

Tata PEMTH : SAMSUL ANWAR  
Kaur PEL. UMUM : M. MA'RUF  
Kaur PEM. MASY : ADE IRAWAN  
Kaur PEM. PEREMP : SRIMALA, S.Pd  
Kaur SOSIAL : MISLINAWATI

Kadus Perumbi : NURSALIM SAINO  
Kadus Rintis : ZAINALYAHYA  
Kadus Bandar Suir : EFENDI JALI  
Kadus Semulur : A. MUIS MONTAN

Staf Pengembangan Dusun Terpencil :

Staf Kemasyarakatan : USLIN UMAR  
Staf Ekora : IRFAN SAPUTRA  
Staf Pembangunan : KHAIRUDDIN,

**Tabel IV.1**  
**Struktur Organisasi Tata Pemerintahan Desa Banglas Barat**



### **C. Visi dan Misi**

#### **a. Visi**

Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan dengan melihat potensi dan kebutuhan desa. Penyusunan Visi Desa Banglas Barat ini dilakukan dengan pendekatan partisipatif, melibatkan pihak-pihak yang berkepentingan di Desa Banglas Barat seperti pemerintah desa, BPD, Tokoh masyarakat, tokoh agama, lembaga masyarakat desa dan masyarakat desa pada umumnya. Pertimbangan kondisi eksternal di desa seperti satuan kerja wilayah pembangunan di kecamatan. Maka berdasarkan pertimbangan di atas Visi Desa Banglas Barat adalah : Meningkatkan Kesejahteraan Hidup Masyarakat Baik Bidang Ekonomi, Sumber Daya Manusia, Keamanan, Serta Membina Semangat Persatuan Dan Kesatuan.

#### **b. Misi**

Selain penyusunan visi juga telah ditetapkan misi-misi yang memuat sesuatu pernyataan yang harus dilaksanakan oleh desa agar tercapainya visi desa tersebut. Visi berada di atas misi. Pernyataan visi kemudian dijabarkan ke dalam misi agar dapat di operasionalkan/dikerjakan. Sebagaimana penyusunan visi, misipun dalam penyusunannya menggunakan pendekatan partisipatif dan pertimbangan potensi dan kebutuhan Desa Banglas Barat, sebagaimana proses yang dilakukan maka misi Desa Banglas Barat adalah :

1. Meningkatkan sumber daya manusia, bebas dari kebodohan, dan mempercepat pertumbuhan ekonomi
2. Mempercepat pembangunan infrastruktur dengan mengembangkan swadaya dan memupuk semangat gotong royong masyarakat

3. Meningkatkan keamanan bagi masyarakat menuju desa cemerlang dan gemilang



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

**Perpustakaan Universitas Islam Riau**

## BAB V

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini akan diuraikan hasil penelitian tentang Analisis Penerapan Akuntansi Pada Desa Banglas Barat Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Kepulauan Meranti, maka penulis akan mencoba menganalisis tentang akuntansi yang diterapkan pada Desa Banglas Barat Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Kepulauan Meranti dalam bab ini adalah :

#### A. Sistem Pencatatan dan Dasar Pengakuan Akuntansi

Sistem pencatatan penerimaan dan pengeluaran buku kas umum yang digunakan oleh Desa Banglas Barat Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Kepulauan Meranti yaitu *single entry* yang merupakan sistem pencatatan tunggal, yaitu setiap transaksi keuangan hanya dicatat (dijurnal) sekali. Metode ini hanya berupa daftar transaksi yang mempengaruhi akun kas, artinya penerimaan kas dicatat sebagai kas masuk, sedangkan pembayaran kas dicatat sebagai kas keluar. Dasar pengakuan akuntansi yang digunakan Desa Banglas Barat Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Kepulauan Meranti adalah basis kas (*cash basis*) merupakan pencatatan dalam akuntansi, dimana setiap transaksi yang terjadi dicatat berdasarkan jumlah nominal yang diterima.

#### B. Proses Akuntansi Desa Banglas Barat

Proses akuntansi menurut IAI-KASP 2015. Proses akuntansi dibagi beberapa tahapan :

## 1. Tahap Pencatatan

Berawal dari bukti-bukti transaksi selanjutnya dilakukan pencatatan ke dalam buku yang sesuai. Buku yang digunakan adalah Buku Kas Umum, Buku Bank dan Buku kas Pembantu Pajak. Pada Desa Banglas Barat Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Kepulauan Meranti semua transaksi baik penerimaan maupun pengeluaran yang dicatat pada Buku Kas Umum sesuai dengan Prinsip Akuntansi Berterima Umum. Berikut format Buku Kas Umum Desa Banglas Barat pada tabel V.1

**Tabel V.1**  
**Buku Kas Umum-Tunai**  
**Pemerintahan Desa Banglas Barat**  
**Tahun Anggaran 2017**

N o	Tanggal	R e k ,	Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)
1.	07/07/2017		Kas dibendahara	135.000.000	
2.	07/07/2017		Pencairan anggaran penghasilan tetap dan tunjangan		125.210.000
3.	07/07/2017		Pencairan anggaran bantuan operasional ketua dan anggota Linmas		6.600.000
4.	07/07/2017		Pencairan anggaran kegiatan operasional kantor desa		3.190.000

Sumber : Buku Kas Umum Tunai Desa Banglas Barat 2017

Buku Bank Yang digunakan pada transaksi yang berkaitan dengan saldo pada bank. Berikut Format Buku Bank Desa Banglas Barat Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Kepulauan Meranti pada tabel V.2

**Tabel V.2**  
**Buku Bank**  
**Desa Banglas Barat**  
**Tahun Anggaran 2017**

No	Tgl	Uraian Transaksi	No. Bukti	Pemasukan		Pengeluaran			Saldo (Rupiah)
				Setoran (Rp)	Bunga (Rp)	Penarikan (Rp)	Pajak (Rp)	B.adm in (Rp)	Saldo (Rp)
	01/01/2017	Pindahan Saldo		218.593.800	0	0	0	0	218.593.800
	07/06/2017	Mutasi kas uang dari Bank	0001/M TSI/01.04/2017	0	0	20.000.000	0	0	198.593.800
	15/06/2017	Mutasi kas uang dari Bank	0002/M TSI/01.04/2017	0	0	195.000.000	0	0	3.593.800
	21/06/2017	Penerimaan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap 1 25%	0002/T BP/01.04/2017	180.344.000	0	0	0	0	183.937.800
	21/06/2017	Penerimaan Dana Desa (DDS) Tahap 1 60%	0003/T BP/01.04/2017	582.142.200	0	0	0	0	766.080.000

Sumber : Buku Bank Desa Banglas Barat 2017

Buku Kas Pembantu Pajak Digunakan untuk mencatat bukti transaksi terkait dengan pemungutan maupun penyetoran pajak oleh bendahara. Berikut format Buku Kas Pembantu Pajak Desa Banglas Barat pada tabel V.3

**Tabel V.3**  
**Buku Kas Pembantu Pajak**  
**Desa Banglas Barat**  
**Tahun Anggaran 2017**

<b>No</b>	<b>Tgl</b>	<b>Uraian</b>	<b>Pemotongan (Rp)</b>	<b>Penyetoran (Rp)</b>	<b>Saldo (Rp)</b>
1	07/06/2017	00007/KWT/01.04/2017 Pembelian Piala rincian terlampir Potongan Pajak PPN Pusat	138.636,00	0	138.636,00
2	07/06/2017	00012/KWT/01.04/2017 Pembelian Alat dan bahan pembersih Posyandu rincian terlampir Potongan Pajak PPN Pusat	156.777,00	0	156.777,00
3	15/06/2017	00016/KWT/01.04/2017 Mesin Pompa Air Pamsimas Potongan Pajak PPN Pusat Potongan Pajak	636.364,00 95.455,00	0 0	636.364,00 95.455,00

Sumber : Buku Kas Pembantu Pajak Desa Banglas Barat

## 2. Tahap Penggolongan

Merupakan tahap mengelompokkan catatan bukti transaksi ke dalam kelompok buku besar sesuai dengan nama akun dan saldo-saldo yang telah dicatat dan dinilai ke dalam kelompok debit dan kredit. Desa Banglas Barat tidak membuat Buku Besar. Berikut contoh Buku Besar yang seharusnya diterapkan oleh Desa Banglas Barat Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Kepulauan Meranti menurut IAI KASP 2015 dan Prinsip Akuntansi Berterima Umum pada tabel V.4

**Tabel V.4**  
**Buku Besar**  
**Tahun Anggaran 2017**

Nama Akun : Pendapatan Transfer

Tanggal	Uraian	R ef	Debit (Rp)	Kredit (Rp)	Saldo	
					Debit (Rp)	Kredit (Rp)
07/07/2017	Pencairan anggaran penghasilan tetap dan tunjangan			125.210.000	125.210.000	
07/07/2017	Pencairan anggaran bantuan operasional ketua dan anggota Linmas			6.600.000	6.600.000	
07/07/2017	Pencairan anggaran kegiatan operasional kantor desa			3.190.000	3.190.000	

Sumber : Hasil Olahan Data Penulis Tahun 2017

**Tabel V.5**  
**Buku Besar**  
**Tahun Anggaran 2017**

Nama Akun : Alokasi Dana Desa

Tgl	Keterangan	Ref	Debit (Rp)	Kredit (Rp)	Saldo	
					Debit (Rp)	Kredit (Rp)
07/07/2017	Penarikan Alokasi Dana Desa			135.000.000		135.000.000

Sumber : Hasil Olahan Data Oleh Penulis Tahun 2017

### 3. Tahap Pengikhtisaran

Pada tahap ini dilakukan pembuatan neraca saldo. Contoh neraca saldo yang seharusnya diterapkan oleh Desa Banglas Barat Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Kepulauan Meranti pada tabel berikut

**Tabel V.6**  
**Neraca Saldo**  
**Desa Banglas Barat**  
**Tahun Anggaran 2017**

Keterangan	Jumlah	
	Debit (Rp)	Kredit (Rp)
Kas	135.000.000	-
Pendapatan Transfer	-	135.000.000

Sumber : Data Olahan Penulis 2019

#### 4. Tahap Penyesuaian

Yaitu menghitung penyesuaian pada aset tetap dan persediaan. Penyesuaian dilakukan untuk menyajikan secara wajar jumlah kekayaan bersih yang dimiliki oleh Desa Banglas Barat. Berikut beberapa transaksi dalam tahap penyesuaian

##### a. Aset Tetap

adalah aset yang memiliki wujud dan siap untuk digunakan/difungsikan dalam operasional desa. Aset tetap tidak dimaksudkan untuk dijual, dan memiliki manfaat yang lebih dari satu tahun. Beberapa aset tetap meliputi : tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, serta jalan, jaringan dan instalasi.

Penyajian aset tetap dalam laporan keuangan Desa Banglas Barat Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Kepulauan Meranti Kekayaan Milik Desa (seperti peralatan dan mesin, gedung dan bangunan).

##### a. Penyusutan untuk Peralatan dan Mesin

Pertahun : Rp 6.500.000 : 5 tahun = Rp 1.300.000

##### b. Penyusutan untuk Gedung dan Bangunan

Pertahun Rp 242.513.700 : 10 tahun = Rp 24.251.370

##### c. Penyusutan untuk Jalan, Jaringan dan Instalasi

Pertahun Rp 812.319.000 : 20 tahun = Rp 40.615.950

Berdasarkan perhitungan di atas, maka pencatatan yang seharusnya dilakukan Desa Banglas Barat Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Kepulauan Meranti sebelum tutup buku adalah sebagai berikut :

1. Pencatatan untuk perolehan aset tetap berupa peralatan dan mesin

Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin                      Rp 1.300.000

    Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin                      Rp 1.300.000

2. Pencatatan untuk perolehan aset tetap berupa gedung dan bangunan

Beban Penyusutan gedung dan bangunan                      Rp 24.251.370

    Akumulasi Penyusutan gedung dan bangunan                      Rp 24.251.370

3. Pencatatan untuk perolehan aset tetap berupa jalan, jaringan dan instalasi

Beban Penyusutan jalan, jaringan dan instalasi                      Rp 40.615.950

Akumulasi Penyusutan jalan, jaringan dan instalasi                      Rp 40.615.950

- b. Persediaan

Persediaan digunakan untuk menghitung sisa persediaan yang masih ada atau dilakukan dengan pembelian terakhir. Pada tahun 2016 dalam Laporan Realisasi Anggaran belanja Benda Pos dan Materai sebesar Rp 423.000. Belanja Alat Tulis Kantor sebesar Rp 31.307.000. Belanja Alat-alat Kebersihan dan Bahan Pembersih sebesar Rp 650.000. Pada tahun 2017 dalam Laporan Realisasi Anggaran belanja Alat Tulis Kantor sebesar Rp 15.629.000. Belanja Alat-Alat Kebersihan dan Bahan Pembersih sebesar Rp 4.377.550. Namun dalam Laporan Kekayaan Milik Desa Banglas Barat Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Kepulauan Meranti untuk tahun 2016 dan tahun 2017 pada bagian Persediaannya bersaldo Rp 0, karena pada akhir periode seluruh barang-barang yang dibeli

b. Laporan Kekayaan Milik Desa

Laporan Kekayaan Milik Desa adalah laporan yang menggambarkan barang milik desa yang berasal dari kekayaan asli desa, dibeli atau diperoleh atas beban anggaran pendapatan dan belanja desa atau perolehan hak lainnya yang sah dari desa Banglas Barat Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Kepulauan Meranti. Laporan Kekayaan Milik Desa yang ada pada Desa Banglas Barat belum sesuai dengan Akuntansi Berterima Umum, tidak menyajikan jumlah pada Aset Lancar yaitu pada kas Desa dan persediaan. Sedangkan pada aset tetap tidak menghitung dan menyajikan penyusutan. Setelah dilakukan penelitian maka Laporan Kekayaan Milik Desa Banglas Barat Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Kepulauan Meranti pada aset lancar terdapat kas Desa tahun 2016 sebesar Rp 20.000.000 dan tahun 2017 sebesar Rp 100.000.000. Tahun 2016 sebelum penyusutan sebesar Rp 534.495.000 dan setelah dilakukan penyusutan sebesar Rp 640.150.750. Sedangkan tahun 2017 sebelum dilakukan penyusutan adalah sebesar Rp 1.061.332.700 dan setelah dilakukan penyusutan terhadap aset tetap adalah sebesar Rp 1.035.171.930 karena adanya penyusutan terhadap aset tetap yaitu : Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, dan Jalan, Jaringan dan Instalasi. Berikut tabel Laporan Kekayaan Milik Desa dibawah ini :

**Tabel V.8**  
**Laporan Kekayaan Milik Desa**  
**Tahun Anggaran 2017**

Uraian	Tahun n (Tahun Periode Pelaporan) 2017	Tahun n-1 (Tahun sebelumnya) 2016
<b>ASET DESA</b> <b>ASET LANCAR</b> Kas Desa Uang kas di Bendahara Desa Rekening Kas Desa Piutang Piutang Sewa Tanah Piutang Sewa Gedung Dst..... Persediaan Kertas Segel Materai Dst.....	Rp 20.000.000           Rp 20.006.550	Rp 100.000.000.-           Rp 32.380.000
<b>JUMLAH ASET LANCAR</b>	<b>Rp 40.006.550</b>	<b>Rp 132.380.000</b>
<b>ASET TIDAK LANCAR</b> Investasi Permanen Penyertaan Modal Pemerintah Desa Aset Tetap Tanah Peralatan dan Mesin Akm. Penyusutan Peralatan dan Mesin Gedung dan Bangunan Akm. Penyusutan Gedung dan Bangunan Jalan, Jaringan dan Instalasi Akm. Penyusutan Jalan Jaringan dan Instalasi Dana Cadangan Dana Cadangan Aset tidak lancar lainnya	Rp 6.500.000 (Rp 1.300.000)  Rp 5.200.000  Rp 242.513.700  (Rp 24.251.370)  Rp 812.319.000 (Rp 40.615.950)	Rp 507.770.250
<b>JUMLAH ASET TIDAK LANCAR</b>	<b>Rp 995.165.380</b>	<b>Rp 507.770.250</b>
<b>JUMLAH ASET (A + B)</b>	<b>Rp 1.035.171.930</b>	<b>Rp 640.150.750</b>
<b>KEWAJIBAN JANGKA PENDEK</b>		
<b>JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK</b>		
<b>JUMLAH KEKAYAAN BERSIH (I-II)</b>	<b>Rp 1.035.171.930</b>	<b>Rp 640.150.750</b>

Sumber : Data Olahan Penulis 2019

Perbandingan Aset tetap 2016-2017 dengan Laporan Realisasi Anggaran

2016-2017. Berikut tabel dibawah ini :

**Tabel V.9**  
**Aset Tetap dan Laporan Realisasi Anggaran**  
**2016-2017**

Aset Tetap 2016	Jumlah	LRA 2016	Realisasi	Aset Tetap 2017	saldo	LRA 2017	Realisasi
-jalan, jaringan dan instalasi	Rp 534.495.000	Belanja modal pengadaan jalan desa	Rp 416.078.900	-peralatan dan mesin	Rp 6.500.000	-Belanja modal pengadaan peralatan kantor	Rp 6.500.000
				-gedung dan bangunan	Rp 242.513.700	-Belanja modal pengadaan sarana dan prasarana pendidikan (Rp 190.3012.000) -belanja modal pengadaan duiker/gorong-gorong (Rp 21.860.000)	Rp 212.161.000
				-jalan, jaringan dan instalasi	Rp 812.319.000	-belanja modal pengadaan jalan desa (Rp 563.552.000) -belanja modal pengadaan sarana air bersih (Rp 156.301.000) -belanja modal pengadaan sumur bor (Rp 37.802.100) -belanja modal pengadaan tali air (Rp 48.290.000)	Rp 805.950.100

Data Olahan Penulis 2019

## BAB VI

### PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya maka dalam bab ini penulis akan menarik kesimpulan dan memberi saran yang diterapkan dapat bermanfaat bagi instansi dalam menjalankan aktivitasnya.

#### A. Kesimpulan

1. Dasar Pencatatan yang digunakan Desa Banglas Barat adalah *Single Entry* dan Dasar Pengakuan yang digunakan adalah *Cash Basis*.
2. Desa Banglas Barat tidak membuat Buku Besar.
3. Belum menghitung penyusutan terhadap aset tetap dalam Laporan Kekayaan Milik Desa agar Laporan Keuangan disajikan lebih akurat.
4. Akuntansi yang diterapkan pada Desa Banglas Barat Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Kepulauan Meranti belum sepenuhnya sesuai dengan Prinsip Akuntansi Berterima Umum.

#### B. Saran

1. Seharusnya Desa Banglas Barat menghitung dan menyajikan penyusutan terhadap aset tetap pada Laporan Kekayaan Milik Desa agar Laporan Keuangan yang Disajikan lebih akurat.
2. Seharusnya Desa Banglas Barat Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Kepulauan Meranti dalam pembuatan laporan keuangan harus sesuai dengan Prinsip Akuntansi Berterima Umum.

## DAFTAR PUSTAKA

- Bastian, Indra. 2015. Akuntansi untuk Kecamatan & Desa. Jakarta : Penerbit Erlangga
- Effendi, Rizal. 2015. Accounting Principles. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada
- Halim, Abdul dan Muhammad Syam Kusufi. 2014. Akuntansi Keuangan Daerah Edisi 4. Jakarta: Salemba Empat
- Hamzah, Ardi. 2015. Tata Kelola Pemerintahan Desa Menuju Desa Mandiri, Sejahtera, dan Partisipatoris. Jawa Timur : Penerbit Pustaka
- Nordiawan, Deddi. 2016. Akuntansi Sektor Publik. Jakarta : Salemba Empat
- Nurcholis Hanif. 2011. Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Jakarta : Erlangga
- Rudianto. 2012. Akuntansi Pengantar. Jakarta : Erlangga
- Rusdianto, Erlin. 2013. Akuntansi Keuangan Daerah Berbasis Akrua. Medan : Brama Ardian
- Sugiono. 2013. Metode Penelitian Kualitatif-Kualitatif dan R&D. Bandung : Alfabets
- Sujarweni Wiratna. 2015. Akuntansi Desa Yogyakarta : Pustaka Baru Press
- Sumpeno, Wahjudin. 2011. Perencanaan Desa Terpadu Cetakan Kedua. Penerbit Read
- Ikatan Akuntan Indonesia-KASP. 2015. Pedoman Asistensi Akuntansi Keuangan Desa
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Dana Desa, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
- Peraturan Pemerintahan Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2006 Tentang Pedoman Akuntansi Desa, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006
- KBBI, 2016. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). [Online] Available at : <http://.kbbi.web.id.akuntansi> [Diakses 28 Maret 2019]